

Wasiyem, S.P.d., M.Si
Hamidah Purba, S.ST., M.KM
Dr. Muhammad Kaulan Karima, S.Pd.I., M.Pd



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan *Good Citizenship*)

Editor : Ramadhani, M.Pd.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

(Upaya Mewujudkan *Good Citizenship*)

Ramadhani, M.Pd. (Ed.)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

(Upaya Mewujudkan *Good Citizenship*)

Wasiyem, S.Pd. M.Si.
Hamidah Purba, S.ST., M.KM.
Muhammad Kaulan Karima, M.Pd.



Wasiyem, dkk.

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)/Wasiyem, dkk

—Ed. 1, Cet. 1. —Medan: Merdeka Kreasi, 2021

xii, 162 hlm., 24 cm.

Bibliografi: hlm. 149

ISBN 978-623-6198-06-3

Hak Cipta © 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.

Wasiyem, S.Pd.M.Si.,

Hamidah Purba, S.St., M.KM.,

Muhammad Kaulan Karima, M.Pd.

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)

Cetakan ke-1, April 2021

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Editor : Ramadhani, M.Pd.

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 148/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai Villa 18,
Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar Penulis	v
Kata Sambutan Dekan FKM UIN Sumatera Utara Medan	vii
Daftar Isi	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Pengembangan Kepribadian (MPK)	1
B. Dinamika dan Tantangan PKn	4
C. Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya Bagi Lulusan Perguruan Tinggi	8
BAB II: KONSEP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	11
A. Pengertian PKn	11
B. Fungsi dan Tujuan PKn	13
C. Sejarah Perkembangan PKn di Indonesia	16
BAB III: IDENTITAS NASIONAL	20
A. Pengertian Identitas	20
B. Pengertian Identitas Nasional	23
C. Faktor Terbentuknya Identitas Nasional	25
D. Identitas Nasional di Indonesia	28

BAB IV: KONSEP NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN	33
A. Pengertian Negara	33
B. Asal Mula Terbentuknya Negara	35
C. Tujuan, Fungsi, dan Wewenang Negara	42
D. Unsur-Unsur Negara	46
E. Kajian Islam tentang Negara	49
F. Konsep Kewarganegaraan	54
G. Warga Negara Indonesia	57
1. Pengertian Warga Negara Indonesia	57
2. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia	58
3. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia	61
4. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	62
BAB V: KONSTITUSI	67
A. Pengertian Konstitusi	67
B. Kedudukan Konstitusi	70
C. Tujuan dan Fungsi Konstitusi	74
D. Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi Pertama NKRI	76
E. Perubahan Konstitusi NKRI	78
F. Piagam Madinah sebagai Konstitusi Pertama di Dunia	79
BAB VI: DEMOKRASI	86
A. Pengertian Demokrasi	86
B. Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi	90
C. Perjalanan Demokrasi di Indonesia	94
D. Kajian Islam tentang Demokrasi	104
BAB VII: HAK ASASI MANUSIA	109
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	109
B. Nilai Dasar dan Penggolongan HAM	112
C. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang RI	115
D. Kajian Islam tentang Hak Asasi Manusia	117

BAB VIII: WAWASAN NUSANTATA SEBAGAI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI	123
A. Konsep Wawasan Nusantar	123
B. Isi Wawasan Nusantara	126
C. Konsep Geopolitik Indonesia	128
D. Konsep Geostrategi Indonesia	132
BAB XI: PERAN PKN BAGI GENERASI MILENIAL DALAM MEWUJUDKAN <i>GOOD CITIZENSHIP</i>	139
A. Konsep Generasi Milenial	139
B. Karakteristik Generasi Milenial	143
C. Peran PKN bagi Generasi Milenial dalam Mewujudkan <i>Good Citenzenship</i>	144
DAFTAR PUSTAKA	149
TENTANG PENULIS	157
TENTANG EDITOR	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Pengembangan Kepribadian (MPK)

Amanat Undang-Undang No 12 tahun 2012, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, namun pada pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Peserta didik di perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa merupakan insan dewasa, sehingga dianggap memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesional. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun 12 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Intinya adalah lulusan yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka mahasiswa harus menempuh pembelajaran Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). MKDU ini telah dinyatakan sebagai mata kuliah wajib, diantaranya yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran, maka MKDU ditambah dengan bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata

kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang terintegrasi maupun individu.

Sejatinya, mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis (Kemenristek Dikti, 2016). Hal ini juga berarti mengarahkan PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa.

PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) dinyatakan dengan tegas dalam beberapa regulasi. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budaya.

Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dinyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa lulusan program sarjana mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah sehingga diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Begitu pula pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan

profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga Negara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Menjadi pertanyaannya adalah mengapa PKn diposisikan sebagai MPK? Apa urgensi PKn sebagai MPK? MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Iriyanto, 2005).

MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman dan dasar kekarwaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menerapkan bekal pendidikannya sebagai cara-cara penemuan, pisau analisis (*a method of inquiry*) dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamdan Mansoer, 2004).

PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dikarenakan dapat membantu mahasiswa-mahasiswi menjadi warga negara yang baik sekaligus paham antara hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis, dengan dibekali nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Mata kuliah PKn juga merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Akhirnya, mahasiswa yang juga merupakan bagian dari warga Negara memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, seperti yang dituangkan pada keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Begitu pula bila dicermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, PKn diharapkan mampu mengemban misi fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Melalui pengasuhan PKn di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratis berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional, berdaya saing secara internasional, warganegara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

B. Dinamika dan Tantangan PKn

Saat ini seluruh Negara di dunia harus siap menghadapi era globalisasi, otomatisasi, dan digitalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi, serta demokrasi liberal di bidang politik. Dalam praktiknya sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-negara maju, mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global.

Bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia. Tarik ulur yang memicu ketegangan saat ini sedang terjadi dalam internal setiap bangsa, antara keinginan untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa, dengan adanya kekuatan nilai-nilai asing yang telah dikemas melalui teknologinya (Iriyanto, 2004).

Sejauh mana kekuatan setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk mengadaptasi nilai-nilai asing tersebut. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat rentan terkooptasi nilai-nilai asing yang cenderung berorientasi praktis dan pragmatis dapat menggeser nilai-nilai dasar kehidupan. Kecenderungan munculnya situasi semacam ini sudah mulai menggejala di kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini.

Banyak usaha yang telah dilakukan, misalnya dilaksanakannya konferensi internasional tentang pendidikan tinggi oleh UNESCO di Paris tahun 1998, dalam konferensi ini disepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggungjawab pendidikan adalah; (1) Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warganegara yang berkesadaran tinggi tentang

bangsa dan kemanusiaan; (2) Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis; (3) Mengubah cara berfikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas.

Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis yaitu “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” Tujuan Pendidikan nasional “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Nyatanya, yang tampak adalah sebagian masyarakat, bahkan para elit yang sudah semakin melupakan peran nilai-nilai dasar yang wujud kristalisasinya berupa Pancasila dalam perbincangan lingkup ketatanegaraan atau bahkan kehidupan sehari-hari. Pancasila sudah semakin tergeser dari perannya dalam praktik ketatanegaraan dan produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas dari konsep filosofis yang seutuhnya. Eksistensi Pancasila nampak hanya dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan dan arah pembangunan.

Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Yaitu persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia.

Hal ini terjadi, karena kurangnya pemahaman seorang warga negara dalam memahami Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sebuah alat legitimasi kekuasaan Orde Baru yang tidak dapat menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi oleh negara. Pemikiran seperti ini membuat semakin banyak orang yang menganggap remeh Pancasila, bahkan menjadi anti Pancasila. Kesalahpahaman

seperti ini menjadikan masyarakat telah kehilangan sumber dan sarana orientasi terhadap nilai sikap anti Pancasila seperti ini dapat menimbulkan masalah baru dalam masyarakat, yaitu berkurangnya sikap nasionalisme.

Masalah lain yang muncul dari eksternal yaitu yang bersumber dari luar adalah globalisasi yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Munculnya sistem baru seperti ini mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global. Masuknya nilai dan sistem-sistem baru dari luar seperti ini menyebabkan terjadinya loncatan atau pergeseran dalam sistem tata nilai kita. Muncul suatu keraguan untuk menerima nilai-nilai baru tersebut atau mempertahankan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh negara kita.



Gambar: Pengaruh Globalisasi bagi Dunia (Sumber: Google.com)

Disinilah peran PKn harus dimunculkan sebagai solusi pemecahan masalah di atas. Dimana PKn mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik.

Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercakup dalam PKn. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh PKn, akan lebih baik lagi jika PKn dimanfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat setiap orang tidak akan mudah goyah dengan tawaran kejayaan, kekuasaan, dll yang sifatnya hanya sementara.

Selain itu, tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa diperoleh begitu saja tanpa belajar. Oleh karena itu, PKn sangat penting manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya dengan cara demokratis dan juga terdidik.

Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dianggap mempunyai tingkat intelektual yang tinggi, cerdas dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Cepat bertindak dan tepat, selalu berpikir kritis adalah sifat yang sudah melekat dalam mahasiswa, hal itu merupakan prinsip saling melengkapi (Siswoyo, 2007).

Selama perkuliahan mahasiswa tidak hanya masuk dan mengerjakan tugas dari dosen saja, tetapi harus mampu melaksanakan serta mengembangkan ilmu yang telah diterimanya, sehingga memiliki kemampuan untuk mengemban tanggung jawab intelektual.

Menurut hasil penelitian dari Suranto dan Rusdianti (2018), bahwa *soft skill* yang menentukan kesuksesan seseorang dalam kepemimpinan suatu bisnis. Seperti penelitian Arnata & Surjosepuo (2014) mengemukakan bahwa di Harvard University Amerika Serikat mengatakan bahwa 20% kesuksesan seseorang diperkirakan berasal dari intelegensia yaitu kemampuan untuk belajar dan memahami. Sementara itu, 80% sisanya berasal dari kemampuan untuk memahami diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain.

Karena masalah hubungan antara warga negara dan pemerintah telah menjadi masalah/wacana umum bahkan banyak dibicarakan hingga merambah ke berbagai lapisan masyarakat dan telah menjadi persoalan bersama maka para mahasiswa sudah seyogyanya dikenalkan pada masalahnya agar mengetahui dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga dapat berperilaku sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh Karena itu, mahasiswa sebagai agen perubahan dalam kehidupan

bermasyarakat harus mampu menunjukkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan sebagai warga Negara yang baik yaitu yang menjalankan keseimbangan antara hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Jangan hanya biasa menuntut hak, akan tetapi kewajiban tidak dilaksanakan.



JADILAH AGEN PERUBAHAN

Gambar 2: Mahasiswa sebagai Agen Perubahan (Sumber: Dunia Kampus-wordpress.com)

C. Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya Bagi Lulusan Perguruan Tinggi

PKn sebagai mata kuliah Pengembangan Kepribadian juga sebagai pendidikan nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi (PT). PKn sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensinya adalah keseluruhan materi program pembelajaran PKn harus mengandung nilai-nilai Pancasila.

Nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekarayaan setiap lulusan PT. Dikarenakan Pancasila merupakan dasar nilai bagi bangsa Indonesia dalam kehidupannya.

Apalagi bagi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang harus mengintegrasikan nilai Islam dan ilmu pengetahuan, memadukan IPTEK (ilmu pengetahuan teknologi) dan IMTAK (iman dan takwa) untuk mempersiapkan lulusan berkarakter tangguh dalam menghadapi tantangan zaman serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.

Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa Nilai Ketuhanan (agama) harus menjadi dasar dalam pengembangan PKn, nyatanya, pengajaran dan pembelajaran

berdasarkan agama masih terbatas dalam menanamkan dan meningkatkan karakter bangsa (Asyafah, 2014).

Peran nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila yang dijelaskan dalam buku Modul Kuliah Kewarganegaraan (Kemendikbud, 2012) adalah:

1. Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME: melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Fahaman nilai ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME, tidak memberikan ruang bagi fahaman ateisme, fundamentalisme dan ekstrimisme keagamaan, sekularisme keilmuan, antroposentrisme dan kosmosentrisme.
2. Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukannya ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.
3. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia sesensinya adalah pengakuan kebhinnekaan dalam kesatuan: koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum.
4. Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. Nilai Kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi ruang bagi fahaman egoisme keilmuan (puritanisme, otonomi keilmuan), liberalisme dan individualisme dalam konteks kehidupan.
5. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu

tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila. Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *civic education*, *democracy education*, *civil education* dsb, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKn di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri, yang notabenehnya merujuk pada nilai Pancasila, akan tetapi hal utama dari nilai tersebut adalah nilai Ketuhanan atau nilai agama.

Sehingga setelah mempelajari PKn diharapkan mahasiswa mampu menjadi warga Negara yang berpikir kritis dan bersikap dan bertindak demokratis. Meminjam ungkapan Zamroni (2003) yaitu warga Negara yang “mudah dipimpin tapi sulit dikendalikan, mudah diperintah tapi sulit untuk diperbudak”.

Bahan Diskusi:

- Pernahkah saudara memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Coba kemukakan secara lisan berdasar pengetahuan awal Anda.
- Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional?
- Mengapa Pancasila dikatakan sebagai Nilai Dasar PKn dalam mengembangkan lulusan perguruan tinggi?

- Branson, Margaret S., dkk. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS.
- Budiardjo, Miriam. 1984. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Perlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Bulac, Ali. 1998. "The Madina Document," dalam Charles Kurzman (ed), *Liberal Islam: A sourcebook*. New York: Oxford University Press.
- Chaidir, Ellydar. 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Cholisin. 2000. *Ilmu Kewarganegaraan- Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdiknas.
- Cholisin. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan Rekonstruksi Paradigma Lama Kewarganegaraan, Menuju Indonesia Baru. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. No. XIX (34), 245.
- Djahiri, Achmad Kosasih. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai Moral VCT dan Games terhadap VCT*. Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung
- Dwyer, Kevin. 1991. *Arab Voice; The Human Rights Debate in the Middle East*. Berkeley: University of California.
- Effendy, Bahtiar. 2009. *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina.
- Elmirzana, Syafa'atun. 2001. Pluralisme Konflik dan Dialog (Analisa dan Reflektif). *Essensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Vol. 1, No. 2. 39.
- Gibb, H. A.R. 1987. *Islam A Historical Survey*. London: Oxford University Press.
- Gunaryadi. 2012. "Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Nasional". *Ceramahan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan*. Jakarta: 24 September 2012.
- Hakiki, Kiki Muhamad. 2016. Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Nomor 1, Vol. 1. 1-17
- Heikal, Muhammad Husein. 1993. *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Horton, B. Paul and Hunt, Chester L. 1993. *Sosiologi* (terj.), Jakarta: Erlangga.

- Humaidi. 2019. Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Generasi Milenial. *Al Falah*, Vol. XIX No. 1, 140-146.
- Huwaiti, Fahmi. 1996. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*. Terj. M. Abdul Ghofar. Bandung: Mizan.
- <http://www.antaranews.com/berita/1282043158/hasil-survei-terbaru-jumlah-pulau-indonesia>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta; Gaya Media Pratama.
- Iriyanto, Widuseno. 2005. *Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofis*, Ismail, Faisal. 2014. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*. Bandung: Rosdakarya.
- Kaelan. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kamil, Sukron. 2002. *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Khalil Abdul. 2002. *Hegemony Qurasiy; Agama, Budaya, Kekuasan*, (terj). M. Faisol Fatawi. Yogyakarta: LkiS.
- Kelsay, John dan Twis, Summer B. 1996. *Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei.
- Kemendikbud RI. 2012. *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Kemenristek. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Khadduri, Madjid. 1999. *Teologi Keadilan: Perspektif Islam*, terj. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khalil, Monawwar. 2001. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1956. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Mathba'ah al-Nashr.
- Klede, Ignas. 2000. *Melacak Akar Konsep Demokrasi: Suatu Kejadian Kritis dalam Ahmad Suaedy, Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*. 2000. Yogyakarta.
- Kusnadi. Modul 1 Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). Universitas Terbuka.

- Lemhannas. 2011. *Materi dan Modul Pemantapan Nilai-Nilai Konstitusi UUD NRI Tahun 1945*. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Jakarta: Lemhannas RI.
- Madani, Malik. 1999. *Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi. Jamal Khazanah*, UNISMA Malang.
- Maftuh dan Sapriya, 2005. Pembelajaran PKn melalui Pemetaan Konsep. *Jurnal Civicus: Implementasi KBK Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam Berbagai Konteks*. 319-328.
- Mahasin, Aswab dalam Imam Aziz, et.al., (ed). 1999. *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia.
- Mahfudz Moh.MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gamma Media.
- Maimunah. 2010. "Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah (Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Piagam Madinah)", (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Majalah, 1991. What is Democracy, United State Information Agency.
- Mapuna, Hadi Daeng. 2017. "Islam dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar)". *Al-Daulah*. Vol. 5. No. 1. 156-163
- Mayer, Ann Elizabeth. 1995. *Islam and Human Rights; Tradisition and Politics*. London: Pinter Publishers.
- Ministry of Culture and Tourism Republic of Indonesia, Directorate General of Marketing (2011). COUNTRY FACTS <http://www.visit-indonesia.com.au/pages/about/countryfacts.php>
- Mulia, Musda. 2010. *Negara Islam*. Jakarta: Kata Kita
- Naim, Ngainun. 2015. Islam dan HAM: perdebatan mencari titik temu. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1: 83-102.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Nurwardani, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti.
- Prasasti, Suci dan Erik Teguh Prakoso 2020. Karakter dan Perilaku Milineal: Peluang atau Ancaman Bonus Demografi. *Consilia: Jurnal Ilmiah BK*. Volume 3 No 1, 10-22.

- Prasetyo, Hendro dan Sahal, Ahmad. 1993. Universalisme HAM: Tanggapan Islam. *Islamika*, Vol. 2.
- Pruit, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. (terj.) Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pulungan, J. Suyuthi. 1993. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pulungan, J. Suyuti. 1995. *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Putra, Yanuar Surya. (2016). Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi. *Among Makarti*. Vol 9 No.18, 123-134.
- Putri, Arum Sutrisni. 2020. Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang)”, media online. Kompas.com.
- Qodir, Zuly. 2004. *Syariah Demokratik, Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, Budhy Munawar. 2010. *Argumen Islam untuk Sekularisme, Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo.
- Rahayu, Minto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Depok: Grasindo.
- Rasyid, Muhammad Ryaus. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Jakarta, Yayasan Wantapone.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1367 H. *Tafsir al Manar*. Kairo: Dar al-Manar.
- Roza, Prima. 2020. *Digital Citizenship: Menyiapkan Generasi Milenial Menjadi Warga Negara Demokratis di Abad Digital*. *Jurnal Sositologi*. Vol. 19. No. 2, 190-202.
- Salahi, M.A. 2006. *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*. (Terj.) M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Samsuri. 2010. “Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi PKn di Indonesia: Studi Pengembangan Kebijakan PKn pada Jejang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi”. *Disertasi Tidak Diterbitkan*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

- Saputra, Edi. 2015. "Peranan Metode Diskusi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)". *TINGKAP* Vol. XI No. 1 . 26-40.
- Sebastian, Yoris. 2016. *Generasi Langgas Millenials Indonesia*. Jakarta: Gagas Media.
- Setiawan, Deny. 2015. *Ilmu Kewarganegaraan*. Medan. Larispa.
- Setiawan, Deny. 2015. *Kapita Selekta Kewarganegaraan*. Medan. Larispa
- Setiawan, Deny. 2017. Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu osial*, 9 (1), 24-33.
- Setiawan, D. dan Fandi F. 2014. *Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Kewarganegaraan*. Medan : Larispa.
- Sihbudi, Riza. 1993. *Masalah Demokratisasi di Timur Tengah: dalam Agama, Demokrasi, dan keadilan*. (terj.) M. Imam Aziz. Jakarta: Gramedia.
- Sirry, Mun'im. 2013. *Kontroversi Islam Awal: Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionalis*. Bandung: Mizan.
- Soedarsono, S. 2002. *Character Building: Membentuk Watak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soemantri, N. 1984. *Metode Mengajar Civics*. Bandung: IKIP Bandung.
- Soemantri. 2010. *Internalisasi PKn dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Surabaya: PT. Alva Media.
- Somantri, M. Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: .Rosdakarya.
- Suparlan, Parsudi. 1999. *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta, LP3ES.
- Suseno, Fran Magnis. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 2003. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, HAR. 2007. *MengIndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Umar, Nasaruddin. 2002. "Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian analitis. *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Perta*, Vol. V. No. 1. 36.

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab A.A. & Sapriya. 2007. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung: UPI Press.
- Wahab, A. Azis. 1999. "Kurikulum PPKn 1994: Isu dan Permasalahan untuk Penyempurnaan" *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Th. Ke-5, No.18.
- Wahyono, S.K. dkk. 1982. *Wawasan Nusantara*. Jakarta: Surya Indah.
- Wahyudin, Imam, "Syariat Sebagai Hukum Sekuler," tersedia: www.web.uct.ac.za
- Wereramantry, C.G., "Islam and Human Rights," dalam Tahir Mahmood (ed.). *Human Rights in Islamic Law No.1*. t.k.p: IOS Series, t.th.
- Wibisono. 2008. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Winaputra dan Budimansyah. 2007. *Civis education. Konteks, Landasan Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Kewarganegaraan SPs UPI.
- Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta Sinar: Grafika.
- Winataputra, Udin S. 2001. *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. Bandung: Disertasi SPS UPI Bandung.
- Winataputra, Udin S. 2014. Memantapkan Paradigma Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai Wahana Pendidikan Kebangsaan. *Prosiding AP3KnI, Prodi PPPKn FIS Universitas Manado*.
- Yakin, Ayang Utriza. *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*. Jakarta: Kencana Pranada Media. 2016.
- Yuliasuti, Rima dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas X*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional.

Zainuddin, M. 2013. *Islam dan Demokrasi* (Artikel). Gema: Media Informasi dan Kebijakan Kampus. UIN Malang. Tersedia: <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi.html>

TENTANG PENULIS



Wasiyem, lahir di Kampung Dondong atau Desa Jentera sekarang namanya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, pada 27 Juli 1968 anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Diseh dan Ibu Waginem. Awal menempuh pendidikan di SD Negeri No.050671 Kampung Gohor tamat tahun 1981 dilanjutkan ke SMP Negeri Stabat kemudian SMA Negeri Stabat Kabupaten Langkat. Tahun 1992 penulis menyelesaikan pendidikan dari FNGK-UDA Medan, 1996 AKTA III FIP-IKIP Medan, tahun 1999 D-IV Perawat Pendidik Jurusan Keperawatan Anak FK-USU Medan, tahun 2002 FKIP dan AKTA IV UMN Medan Program Studi Bimbingan Konseling. Tahun 2012 menyelesaikan Magister Ilmu Administrasi di UPMI Medan konsentrasi Administrasi Pendidikan kemudian tahun 2015 menyelesaikan D-III Kebidanan pada Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan, telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Sejak tahun 1993 penulis aktif bekerja di Akademi Kebidanan Pemko Tebing Tinggi–Sumatera Utara sebagai dosen yang sebelumnya adalah UPT Sekolah Perawat Kesehatan Tebing Tinggi, tetapi pada tahun 1998 Konversi menjadi Akademi Kebidanan Pemko Tebing Tinggi. Sampai tahun 1998 disamping sebagai guru SPK dan Instruktur Klinik PPB pada UPT SPK Tebing Tinggi penulis juga bekerja di Balai Pengobatan dr. Djohan Zen Tebing Tinggi. Selanjutnya sampai akhir Desember 2020 penulis masih bekerja di Akademi Kebidanan Pemko Tebing Tinggi sebagai dosen tetap tetapi bulan Januari sampai dengan Februari 2021 penulis bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi sebagai Analis Kesehatan pada Bidang P2P. Selanjutnya diakhir Februari 2021 sampai sekarang penulis bekerja di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).

Pada 18 Maret tahun 2000 menikah dengan Sabarudin, SH dan dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang bernama Dicky Kurniawan S (20 tahun), Maulana Randy S (17 tahun), Galih Trisurya N (15 tahun) dan Salsabila Karin R (12 tahun) yang selalu memberi semangat, spirit, motivasi dan dukungan kepada penulis kapan dan dimanapun berada disaat suka maupun duka.



Hamidah Purba, SST, M.K.M. lahir di Desa Meriah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai pada 01 Januari 1970, anak pertama dari tiga orang bersaudara dari pasangan Bapak Naim Purba dan Ibu Hj. Saamah Saragih. Mengawali pendidikan di SDN. 102106 Bandar Bejambu tamat tahun 1983, SMP Negeri Rambutan Kota Tebing Tinggi tamat tahun 1986, SPK Tebing Tinggi tamat tahun 1989. Setelah itu melanjutkan pendidikan Program Pendidikan Bidan Tebing Tinggi tamat tahun 1991.

Pendidikan Akademi Kebidanan Pemko Tebing Tinggi tamat tahun 2005, Program Studi Bidan Pendidik USU tamat tahun 2008. Selanjutnya melanjutkan ke Program Pendidikan Magister (S2) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia tamat tahun 2016.

Menikah dengan Adicawarman Thaib, B.Sc. tanggal 09 Januari 1993 saat ini dianugerahi tiga orang anak, dr. Teguh Afandi Nugraha (27 tahun), Fajar Nugraha (23 tahun) dan Tri Handita (22 tahun). Mulai tahun 1991-1993 Bekerja sebagai PNS di Puskesmas Pangkalan Susu pada tahun 1993-1994, kemudian bertugas di Puskesmas Naga Kasiangan Kec. Tebing Tinggi dari tahun 1994-2005, kemudian dari tahun 2006-2020 bertugas di Akbid Pemko Tebing Tinggi sebagai dosen, dan dari bulan Januari 2021 sampai sekarang bertugas di FKM UIN Sumatera Utara.



Muhammad Kaulan Karima, M.Pd. lahir di Desa Gelam, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 23 Juli 1988, anak bungsu dari enam orang bersaudara dari pasangan Bapak H. Abd. Rahman dan Hj. Latifah Hanim. Mengawali pendidikan di SDN. 102072 Bandar Khalipah dan sekaligus MDTAAI Washliyah Bandar Khalipah tamat tahun 2000. Setelah itu melanjutkan

pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung tahun 2000-2006.

Pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN-SU Medan tahun 2006 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan lulus sebagai Wisudawan Terbaik sekaligus mewakili seluruh wisudawan menyampaikan sambutan pada November 2010, selama mengikuti perkuliahan juga aktif berorganisasi di HMI Komisariat Tarbiyah pada tahun 2007-2008. Tahun 2011 Melanjutkan Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana UNIMED Prodi Pendidikan Dasar konsentrasi IPS tamat tahun 2013. Melanjutkan Strata Tiga (S3) tahun 2014-sekarang pada PPs UNIMED Prodi Pendidikan Dasar.

Menikah dengan Ramadhani, M.Pd. tanggal 05 April 2015 saat ini dianugerahi tiga orang anak: Pranaja Muazzam Karim (4,5 tahun) dan Tsania Hilya Karim (2,5 tahun), dan Nevia Andhara Karim (1 bulan). Mulai tahun 2011-sekarang aktif sebagai Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan. Saat ini sebagai Ketua I di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ittihadiyah Labuhanbatu Utara (STIT-AILU). Serta sebagai Ketua Umum DPW Barisan Muda Al Ittihadiyah Sumatera Utara periode 2017-2022.

Karya ilmiah Buku, Prosiding, dan Jurnal yang telah dihasilkan antara lain: (1) Buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling: Konsep dan Teori (Kencana, 2019) ISBN. 978-623-218-436-7. (2) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial: Pengantar dan Konsep Dasar (Perdana Publishing: 2019) ISBN: 978-623-7160-14-4. (3) Buku Sosiologi Pendidikan (Perdana Publishing: 2016) ISBN: 978-602-6462-10-7. (4) Prosiding: *International Conference on Islamic Educational Management*. Judul: *Decision Making: Effective Basic Leadership*. ISBN: 978-623-93575-1-1. (UIN SU Press dan Perdana Publishing, 2020). (5) Prosiding “12th International Workshop and Conference of Asean Studies in Islamic and Arabic Education, Linguistics, Social Sciences and Educational Technology 2019, Judul Evaluasi Program Pembinaan Guru (Awal Hijrah Enterprise Malaysia, 2019) ISBN: 978-967-2224-44-0. (6) Prosiding “1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018), judul *Organizational Culture in Islamic Education Institution: An Analysis from a Historical Perspective*. (Atlantis Press, 2019). ISBN: 978-94-6252-719-5. ISSN: 2352-5398. (7) Prosiding “Batusangkar International Conference III” October 15-16, 2018, Judul “*Openness Of Islamic Learning in Faculty of Science And Technology Students in Access to Religious Information*” (Graduate Programme of IAIN Batusangkar, 2019). ISBN: 978-602-329-074-1. ISSN: 9786023290499. (8) Prosiding: Peningkatan Kontribusi Manajemen